

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

	Hal.	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2004	4
	A. Evaluasi Pelaksanaan Misi	4
	B. Evaluasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2005	18
	1. Rencana dan Realisasi Pendapatan	18
	(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
	(2) Dana Perimbangan	20
	(3) lain-lain Pendapatan Yang Sah	21
	2. Rencana dan Realisasi Belanja	21
	(1) Belanja Aparatur	22
	(2) Belanja Publik	23
	(3) Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	24
	(4) Belanja Tidak Tersangka	25
	3. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	25
	(1) Penerimaan Daerah	26
	(2) Pengeluaran Daerah	26
BAB III	KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2006 DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2006	27
	4.1. Kebijakan Pendapatan	27
	4.2. Kebijakan Belanja	28
	4.3. Kebijakan Pembiayaan	50
BAB IV	PENUTUP	51



PEMERINTAH KOTA BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR : 910/2560 – Bapp
: 910/519 – DPRD

TENTANG
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2006

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima (Rabu, 19-10-2005), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DADA ROSADA : Walikota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. HUSNI MUTTAQIN : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Aceh Nomor 36 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Membaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
10. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005 tentang APBD Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Tahun Anggaran 2006 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2006 mengalami masa transisional peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang lama kepada peraturan per-undangan yang baru.

Sehingga dengan keadaan transisi tersebut dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum ini masih menggunakan Peraturan perundangan tentang Keuangan Negara dan Keuangan Pemerintahan Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dilain pihak pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2006 masih akan tetap berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD tahun Anggaran 2006 masih tetap berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 baik secara struktur maupun secara substansi. Sesuai dengan Kep-Mendagri tersebut, AKU APBD pada dasarnya adalah Rencana tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang yang dimuat dalam Rencana Statejik (RENSTRA) daerah. Dengan demikian AKU APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan dijabarkan lebih lanjut kedalam petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum kebijakan yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008, Kebijakan umum tahun anggaran 2006 masih tetap diarahkan dalam rangka pencapaian visi kota Bandung yaitu Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, dengan focus pada pembangunan yang berbasiskan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana disepakati antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Se Jawa Barat.

Untuk merealisasikan pencapaian visi, misi maka diperlukan adanya kebijakan umum yang dituangkan melalui 17 (tujuh belas) agenda prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun 17 agenda pembangunan tersebut adalah :

1. Membangun sinergitas pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) berbasis kewilayahan dalam berbagai sektor;
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi;
3. Meningkatkan kualitas pariwisata Kota Bandung;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pengawasan mutu produk pertanian;
5. Pemberdayaan dan pengembangan BUMD;
6. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi;
9. Pengembangan wilayah Bandung Timur;
10. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur kota;
11. Meningkatkan pelayanan transportasi kota;
12. Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup;
13. Meningkatkan kualitas perencanaan kota;
14. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
15. Pengembangan kemitraan dalam rangka mendukung pembiayaan dari berbagai aspek;
16. Meningkatkan seni budaya daerah & prestasi olah raga;
17. Pengembangan masalah sosial & pemberdayaan perempuan.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Kota Bandung Tahun 2004-2008 serta RKPD tahun 2006.

Tujuan

Sedangkan tujuan dari Arah Kebijakan Umum pembangunan kota Bandung yang akan digunakan,

- 1) Sebagai dasar penyusunan strategi dan prioritas RAPBD Kota Bandung Tahun anggaran 2006;
- 2) Sebagai dasar penyusunan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2004

A. EVALUASI PELAKSANAAN MISI

Kota Bandung dalam konteks pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping 13 kota yang lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Manado, Ujung Padang, Biak. Disamping itu dalam RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan juga sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata dan perkebunan. Sedangkan dalam konteks pembangunan regional sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat disamping DKI Jakarta.

Peran strategis Kota Bandung tersebut di atas menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk maksud tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program-program pembangunan selama ini.

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dari pelaksanaan pembangunan setiap pelaksanaan Misi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kota Bandung tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut :

1. Aspek SDM

Perkembangan IPM di Kota Bandung, berdasarkan kriteria UNDP berada pada posisi menengah atas, dengan pencapaian IPM pada tahun 2004 sebesar 77,17 meningkat sebesar 0,02 dari tahun 2003 yang mencapai 77,15. Kondisi pencapaian IPM Kota Bandung tersebut berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pencapaian IPM pada tingkat Provinsi Jawa Barat, yang mana pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2004 adalah sebesar

68,36 . Terjadinya Peningkatan IPM Kota Bandung tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai dari masing-masing komponen pendukung IPM yaitu dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli. Adapun Aspek daya beli akan diuraikan pada aspek ekonomi. Secara terinci aspek kesehatan dan aspek pendidikan diuraikan sebagai berikut :

Aspek Kesehatan, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) yang setiap tahunnya meningkat sebesar 0,02 tahun pada tahun 2004 menjadi 72,54 dari tahun 2003 yang mencapai 72,52 tahun, yang berdampak terhadap peningkatan Indeks Peluang Hidup sebesar 0,03 pada tahun 2004, menjadi 79,23 dari tahun 2003 yang mencapai 79,20. Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat Indeks Peluang Hidup Kota Bandung pada tahun 2004 lebih tinggi yang mana pencapaian Indeks Peluang Hidup Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama adalah sebesar 67,23.

Aspek Pendidikan, diukur melalui Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH Kota Bandung pada tahun 2004 menurun sebesar 0,53 menjadi 99,01 dari tahun 2003 yang mencapai 99,54, salah satu faktor yang cukup signifikan mempengaruhi penurunan tersebut adalah tingginya tingkat migrasi yang tidak disertai dengan kualitas pendidikan yang memadai. Sedangkan RLS pada tahun 2004 tidak mengalami perubahan dari tahun 2003 yang mencapai 10,32 tahun.

Secara umum penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan jumlah partisipan sekolah yang terdapat di Kota Bandung. APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandung telah menunjukkan angka yang membanggakan yaitu 127,86% ditahun 2003/2004 dan pada tahun ajaran 2004/2005, meningkat menjadi 138,41%. APK untuk jenjang SMP/ sederajat untuk tahun ajaran 2003/2004 sebesar 100,75% sedangkan ditahun ajaran 2004/2005 menjadi 106,85%.

Namun untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan angka yang masih perlu ditingkatkan, capaian aspek SMA/MA/SMK tahun ajaran 2003/2004 baru mencapai 81,83% sementara pencapaian APM sebesar 58,2%. Berdasarkan data tersebut nilai APK lebih besar dari nilai APM, hal ini disebabkan oleh terdapatnya siswa yang mengikuti pendidikan di Kota Bandung tetapi bukan warga Bandung.

Dari gambaran keadaan pendidikan Kota Bandung meskipun secara umum menunjukkan adanya peningkatan pencapaian APK, APM. Namun angka-angka

ini masih belum memenuhi target yang diharapkan karena masih terdapat angka prosentase penduduk usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak berada di sekolah (Non Scholling Gap) masih terdapat angka putus sekolah (Drop Out), hal ini terindikasikan dari nilai rata-rata lama sekolah di kota Bandung untuk tahun 2004 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2003 yang mencapai 10,32 Tahun.

Sebagai dampak dari kondisi aspek-aspek pendidikan tersebut yang berpengaruh secara langsung terhadap nilai komposit IPM, maka pencapaian Indeks Pendidikan Kota Bandung tahun 2004 adalah sebesar 88,94 menurun 0,35 point dibanding tahun 2003 yang besarnya mencapai 89,29. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan pencapaian Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama yaitu sebesar 79,02 maka kondisi Indeks Pendidikan Kota Bandung lebuah baik.

Faktor – faktor yang masih menjadi penghambat keberhasilan pendidikan dan Kesehatan di Kota Bandung adalah:

1. Faktor ekonomi sebagian orang tua belum dapat mendukung secara optimal bagi kelangsungan pendidikan putra-putrinya, hal ini berarti aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pendidikan masih rendah;
2. Masih rendahnya infrastruktur pendidikan belum meratanya keberadaan pendidikan disetiap kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Keberadaan tenaga pendidik/guru belum optimal dalam memenuhi kebutuhan, kendala yang terjadi seperti kurangnya tenaga pendidik/guru baik kuantitas maupun kualitasnya, penyebaran tenaga pendidik/guru belum merata dan masih ada tenaga pendidik/guru yang tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan;
4. Dukungan masyarakat dan dunia kerja/dunia industri, masih perlu ditingkatkan terutama pentingnya pendidikan bagi kehidupannya, karena masih ada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang mempekerjakan anak usia sekolah, upah kerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan serta pembangunan kawasan industri yang kurang memperhatikan perkembangan dunia pendidikan;
5. Peran SKPD terkait serta lembaga/organisasi/kelompok masyarakat terhadap pendidikan belum terorganisir secara optimal.
6. Belum optimalnya masyarakat melaksanakan pola hidup sehat, yang antara lain diindikasikan dengan :
 - Masih relatif tingginya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan

- Masih tingginya angka kesakitan karena diare dan kejadian luar biasa yang disebabkan vektor penyakit menular.
- Adanya kecenderungan gejala *Emerging Diseases* (yang baru muncul), seperti HIV/AIDS di Kota Bandung yang perlu diwaspadai dan disikapi.
- *Re-Emerging Diseases* (munculnya kembali penyakit), seperti TBC, yang rata-rata menyerang Keluarga tidak/kurang mampu.
- Munculnya kecenderungan penyakit degeneratif karena perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan seperti : jantung koroner, darah tinggi dll.

2. Aspek Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, berkembang cukup signifikan yaitu dari 7,31 % pada tahun 2003 menjadi 7,47 % pada tahun 2004 (Data BPS sangat sementara), kondisi tersebut sudah berada di atas LPE Propinsi Jawa Barat yaitu 4,50 % pada tahun 2003 menjadi 5,06 % pada tahun 2004. PDRB perkapita kota Bandung atas dasar harga konstan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.772.605 menjadi Rp 12.282.595 dari tahun 2003 yang mencapai Rp 10.509.990. Berdasarkan kriteria Bank Dunia angka pemerataan pendapatan di Kota Bandung baru mencapai 13,34 %, yang berarti bahwa 40 % penduduk (893.050 jiwa) berpenghasilan rendah menerima pendapatan rata-rata perkapita per tahun sebesar 13,44 % dari seluruh PDRB Kota Bandung yang mencapai Rp 19.402.859.000.000,-, maka sejumlah 893.050 jiwa hanya menikmati sebesar Rp. 2.898.318,-. Sementara sejumlah 40 % (893.050 jiwa) menerima 26,47 % dari total PDRB atau menerima sebesar Rp 5.751.006,- sedangkan 20 % penduduk (446.525 jiwa) berpenghasilan tinggi menikmati sebesar 61,19 % dari total PDRB atau menerima pendapatan rata-rata perjiwa pertahun sebesar Rp 26.154.383, dengan demikian masih terjadi disparitas dalam distribusi pendapatan Kota Bandung.

Masih adanya disparitas pendapatan tersebut telah berdampak kepada rendahnya daya beli sebagian besar masyarakat Kota Bandung, yang dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin mencapai 82.396 KK/312.799 jiwa (BKB 2003) dan indeks daya beli sebagai salah satu komponen pendukung IPM dari aspek ekonomi, belum mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu hanya sebesar 0,40, dari 62,95 pada tahun 2003 menjadi 63,35 pada tahun 2004, sedangkan dalam kesepakatan antara gubernur dengan para bupati/walikota se-Jawa Barat, dalam mendukung pencapaian IPM Jawa Barat, indeks daya beli Kota Bandung

pada tahun 2004 di targetkan sebesar 64,9 %. Jadi indeks daya beli Kota Bandung masih dibawah harapan / target IPM Jawa Barat. Indeks daya beli tersebut setara dengan standar hidup layak atas dasar Purchasing Power Parity (PPP) yaitu sebesar Rp 573.154, nilai tersebut masih dibawah nilai konsumsi perkapita secara nasional untuk kota-kota besar, mencapai Rp 732.720. Dampak lain dari rendahnya daya beli tersebut adalah terhadap belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

Kontribusi sektor yang cukup besar terhadap PDRB kota Bandung berasal dari sektor jasa yang disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor prasarana (*utility*). Usaha-usaha tersebut sebagian besar dilaksanakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi kota Bandung, tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ***belum terbangunnya sinergitas pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) dalam berbagai aspek***. Pemberdayaan KUMKM masih bersifat parsial/sektoral, sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Jumlah koperasi di Kota Bandung mencapai 2.801 unit dengan jumlah UMKM sebanyak 73.027 unit. Bila dilihat dari kegiatan usahanya maka KUMKM telah menyentuh hampir seluruh bidang perekonomian dimasyarakat, meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, keuangan dan lain-lain.

Perkembangan Ekonomi Kota Bandung tidak terlepas dari jumlah investasi yang masuk, karena hal ini mempunyai efek ganda yang cukup besar apabila investasi tsb dilakukan pada sektor riil atau manufaktur. Pada tahun 2004 kenaikan investasi di kota Bandung relatif kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada umumnya investasi tersebut dilakukan pada sektor proverty sehingga efek ganda yang ditimbulkan relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh upaya peningkatan investasi PMD dan PMA belum optimal terutama mencakup pelayanan perijinan yang masih memerlukan evaluasi, hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ***Rendahnya Daya Saing Kota Bandung***.

Berdasarkan penilaian Komite Pemantau Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dituangkan dalam Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota

Di Indonesia Tahun 2004, Kota Bandung tidak mendapat penghargaan sebagai kota yang mempunyai daya tarik untuk berinvestasi baik dari kategori umum maupun berdasarkan faktor sebagai berikut (Range Penilaian terbaik s/d terburuk adalah AAA s/d E) :

1. Faktor Kelembagaan adalah faktor yang secara langsung dibawah kendali pemerintah daerah (policy variabel), yang dapat mempengaruhi penetapan arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yg kondusif bagi investor, salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada publik. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **mengalami penurunan penilaian**, dimana pada tahun 2003 memperoleh Kategori BB, menjadi D Pada Tahun 2004.
2. Faktor Sosial Politik merupakan prasyarat mutlak untuk daya tarik investasi suatu daerah karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat dan kondisi politik yang kondusif. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **tidak mengalami perubahan penilaian**, tetap pada kategori C. Kondisi tersebut masih jauh dari harapan, sehingga perlu dievaluasi.
3. Faktor Ekonomi Daerah adalah indikasi dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kedua aspek tersebut harus berjalan selaras agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli dan sikap mental yang mendorong kearah kemajuan dan modern. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **mengalami peningkatan penilaian** dari kategori BB menjadi AAA, hal ini didukung oleh pencapaian PDRB dan IPM yang meningkat dari tahun ke tahun.
4. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas adalah merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam faktor produksi yaitu sebagai motor penggerak disamping kapital dan input produksi. Dari Ketiga variabel yang tergabung tersebut terlihat bahwa variabel tenaga kerja dan produktivitas memiliki bobot yang besar dalam pertimbangan keputusan berinvestasi. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **tidak mengalami perubahan penilaian**, tetap pada kategori C.

5. Faktor Infrastruktur Fisik yang mencakup ketersediaan dan kualitasnya merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Semakin besar skala usaha maka semakin besar pula kebutuhan infrastruktur fisik. Dari hasil pemeringkatan berdasarkan faktor infrastruktur fisik terlihat bahwa daerah-daerah yang berada di pusat pertumbuhan dan yang termasuk dalam wilayah metropolitan atau daerah penyangga kota-kota besar mempunyai nilai peringkat atas. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **mengalami peningkatan penilaian** dari BB menjadi AA. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Bandung yang tercermin dalam PDRB dan LPE yang meningkat dari tahun ketahun tidak didukung oleh sektor riil tetapi didorong oleh konsumsi masyarakat sehingga peningkatan PDRB dan LPE tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang cukup potensial dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada PDRB Kota Bandung dengan laju pertumbuhan meningkat dari tahun 2002 sebesar 5,13% menjadi 7% pada tahun 2003 (BPS angka sementara). Disamping itu juga sektor pariwisata merupakan salah satu sumber PAD dengan kontribusi mencapai 35% terhadap PAD Kota Bandung pada tahun 2004. Walaupun demikian sampai saat ini penggalan PAD dari sektor ini dinilai belum optimal, hal ini disebabkan **belum tersedianya arah pengembangan pariwisata yang jelas yang sesuai dengan karakteristik kota Bandung**, sehingga target dari sektor ini belum dapat terprediksi dengan pasti/akurat. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pelayanan sektor lain (a.l. Aksesibilitas, keamanan, kenyamanan) karena pariwisata bukan merupakan sektor mandiri tapi keterkaitan dengan sektor lain sangat erat.

Kota Bandung dengan berbagai macam peran yang diembannya terutama sebagai pusat kolektif distributif barang dan jasa, sebagai pusat konsumsi, menuntut pemerintah kota berkewajiban menyediakan pangan dengan kuantitas dan kualitas produk sesuai kebutuhan dan kepercayaan masyarakat yang dianut, sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung dalam berbagai aspek, tuntutan **pengawasan terhadap mutu produk pangan yang beredar di Kota Bandung belum dapat dilaksanakan secara optimal.**

3. Aspek Sosial Budaya

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan misi sosial budaya adalah :

1. Semakin meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama pada tahun 2004 yang ditandai dengan tidak terjadinya perselisihan yang berbau sara di kota Bandung
2. Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Lokal (AKL) yaitu 1.326 orang pada tahun 2003 menjadi 1.950 orang pada tahun 2004, meningkatnya jaminan serta perlindungan tenaga kerja, meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta semakin meningkatnya kesejahteraan pekerja yang ditandai dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota dari Rp. 538.000,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 588.000,- pada tahun 2004.
3. Semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 84.288 KK pada tahun 2003 menjadi 82.914 KK pada tahun 2004;
4. Semakin meningkatnya pemberdayaan organisasi sosial dalam penanganan masalah sosial melalui pemberdayaan 60 orang pengurus organisasi sosial dan pembinaan 150 anak terlantar di Kota Bandung;
5. Semakin meningkatnya peran perempuan dalam segala aktivitas pembangunan;
6. Semakin meningkatnya administrasi kependudukan yang ditandai dengan tingkat akurasi data kependudukan semakin baik;
7. Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan kepemudaan, serta meningkatnya prestasi atlet pada POPDA dan PORWIL;
8. Semakin meningkatnya pelestarian seni budaya daerah melalui pengembangan dan pementasan seni budaya melalui 360 apresiator.

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih perlu ditangani adalah :

- a. Masih tingginya jumlah pengangguran pada tahun 2004 mencapai 85.000 orang dengan jumlah pencari kerja mencapai 42.275 orang dikarenakan rendahnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja lokal serta terbatasnya lapangan pekerjaan
- b. Rendahnya produktivitas dan daya saing potensi tenaga kerja dari Angkatan Kerja Lokal

- c. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Sosial (Gelandangan, Pengemis dan Anak jalanan)
- d. Belum optimalnya penanganan administrasi kependudukan
- e. Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas, peredaran nafza dan miras serta Pekerja Seks Komersial (PSK) dan perjudian
- f. Belum optimalnya peningkatan prestasi olah raga dan kepemudaan

4. Aspek Penataan Kota

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan misi Penataan Kota untuk kebinamargaan adalah semakin meningkatnya kondisi jalan di kota Bandung yang ditandai dengan (1) terpeliharanya jalan dan jembatan sepanjang 302.324 m² pada tahun 2003, sedangkan tahun 2004 sepanjang 277.302 m², (2) peningkatan jalan sepanjang 55.291 m² pada tahun 2003 dan 47.813 m pada tahun 2004, pemeliharaan dan peningkatan jalan pada tahun 2004 apabila dilihat secara kuantitatif mengalami penurunan, namun jika dilihat secara kualitatif mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemeliharaan dan peningkatan jalan pada tahun 2004 lebih di fokuskan di pusat kota dalam rangka persiapan Konfrensi Asia Afrika. hasil selanjutnya adalah (3) peningkatan jembatan sebanyak 3 buah pada tahun 2003 dan 5 buah pada tahun 2004, (4) terpeliharanya saluran drainase jalan sepanjang 50.743,62 m pada tahun 2004, (5) terpeliharanya trotoar melalui pembuatan/rehabilitasi trotoar sepanjang 10.325 m, (6) pembuatan gorong-gorong sebanyak 12 buah, (7) pembuatan papan nama jalan sebanyak 300 buah. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan teknis jalan, saluran dan trotoar sebanyak 72 paket dan satu dokumen studi kelayakan fly over dr. Junjuran serta tersedianya lahan seluas 783 m² untuk lahan Fly Over Kiaracandong dan 5.042 m² untuk jembatan layang pasupati.

Untuk Dinas Bangunan adalah meningkatnya penertiban bangunan dari 456 bangunan pada tahun 2003 menjadi 509 bangunan pada tahun 2004 dan meningkatnya jumlah pelayanan IMB dari 3.409 pada tahun 2003 menjadi 3.638 pada tahun 2004 serta tersedianya 117 data rincian bangunan yang terkena proyek.

Untuk Dinas Pengairan adalah terselenggaranya penanganan kebersihan kali Cikapundung yang melibatkan unsur aparat Pemerintah Kota, TNI, Polri dan unsur masyarakat pengusaha, Ormas dan OKP yang berjumlah 11.848

orang dengan pembiayaan sebagian ditanggulangi oleh pengusaha, Bank NISP, Bank Jabar, dan BCA dengan hasilnya adalah terangkatnya sedimentasi dan sampah kali Cikapundung sebanyak 2.116 meter kubik serta terlaksananya pengumpulan data asset pengairan berupa saluran sepanjang 4.049 m dan penertiban asset saluran sepanjang 14.673 m.

Untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Semakin meningkatnya kondisi taman, pemakaman dan penerangan jalan umum di kota Bandung yang ditandai dengan : (1) peningkatan pemeliharaan taman yang dimitrakan dengan pihak ke tiga, yaitu sebanyak 2 taman pada tahun 2003 menjadi 43 taman tahun 2004, dengan jumlah keseluruhan taman sebanyak 505 taman, (2) terpeliharanya tempat pemakaman umum sebanyak 5 TPU pada tahun 2003 dan 5 TPU pada tahun 2004 serta, (3) meningkatnya pembangunan PJU yaitu dari 24 titik pada tahun 2003 menjadi 224 titik PJU pada tahun 2004 dengan jumlah keseluruhan titik PJU sebanyak 15.300 titik.

Disamping itu dalam pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- Penambahan Ruang Terbuka Hijau :
 - Penataan tegallega melalui kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh 43 perwakilan Kepala Negara dari 105 Kepala Negara yang diundang. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan menambah kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung yang sampai saat ini baru mencapai 2% dari total luas wilayah yang secara ideal seharusnya mencapai luasan 20%. Dengan kegiatan tersebut diharapkan ada penambahan RTH di Kota Bandung sebesar 17 ha atau menambah 1% dari luasan RTH yang ada.
 - Penutupan 5 buah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada pada jalur hijau, sehingga diharapkan menambah luas RTH yang ada seluas 1 ha
 - Penataan bekas kawasan pasar Ujunberung yang akan dijadikan RTH seluas 0,8 ha
 - Menata kawasan pasar elektronik Cikapundung yang akan dijadikan RTH seluas 0,4 ha
 - Peningkatan taman-taman strategis yang telah dimitrakan sebanyak 43 taman, taman non strategis, taman-taman masyarakat, taman-taman sekolah dan taman-taman instansi

- Rehabilitasi dan penataan kawasan Punclut sehingga diharapkan dapat menambah luas kawasan RTH seluas 10 ha.

- Gerakan Sejuta Bunga

Kegiatan ini telah dilaksanakan yang dikomandoi oleh Walikota Bandung dengan menanam sejuta bunga dan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Untuk Dinas Perhubungan adalah Terpeliharanya 15 paket penataan terminal dan sub terminal, satu unit gedung pengujian kendaraan bermotor (PKB), satu unit bengkel pelayanan umum dan tersedianya 14 peralatan PKB

Untuk Pertanahan adalah Terlaksananya sertifikasi tanah sebanyak 216 bidang dan sertifikasi tanah sistematis sebanyak 250 bidang

Untuk bidang Lingkungan Hidup adalah terlaksananya penanaman pohon sebanyak 269.370 pohon yang berlokasi di sekitar TPA Pasir Impun, 10 titik mata air, 12 jalur arteri kota serta terlaksananya pembangunan 3.275 sumur resapan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL/UPL terhadap kegiatan industri, rumah sakit dan hotel.

Sedangkan hasil-hasil misi Penataan Kota lainnya adalah bertambahnya lahan pengembangan sarana pasar Gede Bage seluas 2,4 ha sehingga menjadi 4,81 ha serta tersusunnya peta penggunaan tanah 1 : 5.000 untuk 4 kecamatan yaitu : Cicendo, Bandung Wetan, Sumur Bandung dan Cibeunying Kidul serta tersedianya 420 lembar foto udara skala 1 : 1.000 dan tersedianya hasil perbaikan peta Rencana Teknik Ruang Kota sebanyak 150 lembar

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih perlu ditangani adalah :

- a. Belum siapnya sarana dan prasarana fisik kota guna mendukung kedudukan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi yang merupakan Pusat jasa yang juga harus menampung beberapa aktivitas masyarakat dari luar Bandung, terutama setelah dibukanya Jalan Tol Cipularang. Ketidaksiapan sarana dan prasarana fisik kota, terutama jalan menyebabkan kondisi kemacetan yang semakin parah.
- b. Perlunya kesinambungan dan pemantapan penataan kota Pasca pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, khususnya dalam rangka mempertahankan kondisi kota yang sudah tertata di 7 titik dan daerah-daerah yang jadi perhatian, termasuk taman dan elemen estetika kota, serta

memperluas wilayah penataan termasuk penyediaan ruang terbuka hijau, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

- c. Masih belum konsistennya aspek penegakan hukum bagi pelanggar K-3 yang menyebabkan kesemrawutan kota, terutama di pusat kota khususnya di 7 titik keramaian.
- d. Terbatasnya ketersediaan air baku sebagai akibat tekanan pertambahan penduduk dan penurunan debit sumber air karena tingginya *run off* air hujan yang tidak diimbangi upaya-upaya konservasi yang melibatkan peran serta segenap lapisan masyarakat. Pada saat ini cakupan pelayanan air bersih baru mencapai lk. 53 % dari total populasi dengan pelayanan 60 liter/orang/hari. Disamping itu masih ada tingkat kebocoran yang cukup tinggi.
- e. Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah, termasuk peralatan dan kurangnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, serta mahalnya teknologi pengolahan sampah. Pada saat ini cakupan pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai \pm 69 % dari total wilayah. Cakupan pelayanan sampah ini menjadi sangat menurun ketika TPA Leuwigajah tidak dapat dipergunakan dan belum ada TPA pengganti.
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, termasuk kebiasaan membuang sampah di badan sungai dan perairan, hal ini diperburuk dengan semakin tingginya volume sampah yang dihasilkan warga Kota Bandung maupun pendatang. Di samping itu belum memadainya kesadaran masyarakat untuk mengurangi volume sampah dengan pemilahan sampah organik dan non organik.
- g. Menurunnya kondisi sanitasi lingkungan karena keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan permukiman terutama di kawasan padat penduduk. Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik tersebut dapat mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
- h. Menurunnya kualitas lingkungan terutama pada kawasan dengan konsentrasi kegiatan tinggi. Penurunan kualitas lingkungan ini dapat ditunjukkan dengan hasil pengukuran kualitas udara yang pada beberapa lokasi yang dipantau telah melebihi ambang batas.

- i. Belum meratanya pelayanan infrastruktur kota terutama di wilayah Bandung Timur menyebabkan masih terkonsentrasinya aktivitas di wilayah Bandung Barat.

5. Aspek Pemerintahan Kota

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan misi Pemerintah Kota adalah :

1. Terlaksananya operasi penertiban PKL pada kawasan 7 titik sebanyak kurang lebih 2.500 PKL yang telah direlokasi ke Gedung Dezon 225 PKL, toko Ria 635 PKL dan Pasar Induk Gedebage 1.640 PKL;
2. Meningkatnya penyebaran penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan Radio Sonata 47, penerbitan Swara Bina Kota sebanyak 12.000 exemplar dan melalui media massa yang ada di kota Bandung;
3. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ditandai dengan menurunnya jumlah temuan melalui pelaksanaan pemeriksaan pada 80 objek pemeriksaan dengan hasil 445 temuan pada tahun 2003, sedangkan tahun 2004 menjadi 434 temuan;
4. Terlaksananya test urine bagi 1.563 pejabat eselon II, III dan IV yang hasil seluruhnya dinyatakan negatif sebagai pengguna narkoba;
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana aparatur yang ditandai dengan terpeliharanya 20 unit bangunan gedung sarana pelayanan umum, tersedianya 54 unit Handy Talky dan 95 sarana mobilitas kantor serta terenasasinya 7 kantor dan 1 rumah dinas camat dan 10 Kantor Lurah di kota Bandung;
6. Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan sebanyak 81 orang, diklat teknis sebanyak 652 orang, dan telah dilaksanakannya Workshop Mind Setting yang diikuti oleh 40 orang pejabat eselon II dan III serta dilaksanakan pula workshop Public Relation yang diikuti oleh 40 orang pegawai dari unit kerja yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
7. Tersusunnya produk hukum daerah yaitu berupa 21 buah Peraturan Daerah, 16 buah Keputusan Walikota bersifat Regeling, 132 buah Keputusan Walikota bersifat Besiking serta dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) di 5 Kelurahan, penanganan 27 perkara PTUN, penyelesaian 300 Surat Perjanjian dan publikasi produk hukum daerah melalui penyebaran 500 buku peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih perlu ditangani adalah :

- a. Sangat cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan yang memayungi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya peraturan mengenai kelembagaan dan ketatalaksanaan yang merupakan pedoman sistem kerja dan tatalaksana perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Belum terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah
- d. Terbatasnya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.
- e. Belum proporsionalnya penyebaran pegawai terutama pada kecamatan dan kelurahan yang menyebabkan kurangnya personil di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
- f. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada beberapa unit kerja.
- g. Masih adanya **debirokratisasi** dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi maupun sebagai akibat kurang efektifnya kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah.
- h. Belum efektifnya sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya peningkatan kualitas kemampuan aparatur.

6. Aspek Keuangan Kota

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan misi Keuangan Kota adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar Rp. 7,79 milyar yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 215,11 milyar menjadi sebesar Rp. 222,91 milyar pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 3,50%;

2. Meningkatnya kinerja pengelolaan parkir yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembinaan kepada juru parkir yaitu pada tahun 2003 dibina sebanyak 300 orang juru parkir dan pada tahun 2004 sebanyak 400 orang juru parkir serta bertambahnya pemarkaan area parkir di badan jalan seluas 803 m², atau dari 2.893 m² pada tahun 2003 menjadi 3.696 m² pada tahun 2004. walaupun demikian target retribusi parkir pada tahun 2004 belum dapat tercapai, namun kami akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan perparkiran di kota Bandung;
3. Tersusunnya APBD kota Bandung tahun 2004 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan APBD kota Bandung Tahun 2004 yang ditandai dengan semakin baiknya administrasi keuangan daerah yang dilakukan oleh pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota Bandung;
5. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan di kota Bandung.

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih perlu ditangani adalah :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- b. Belum terwujudnya akuntabilitas pengelolaan kota yang melibatkan fungsi kontrol sosial masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran dunia usaha swasta dalam pembangunan.
 - Menurunnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan
 - Belum optimalnya peningkatan kinerja apratur,
 - Belum terwujudnya sinergitas hubungan kerjasama antar daerah
 - Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber pembiayaan keuangan kota.

B. EVALUASI APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2005

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Penerimaan Yang Sah dan pembiayaan. Penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumber dana yang diperlukan

untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 yang masih mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 terdiri dari : (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2005 di dalam Arah Kebijakan Umum terbatas sampai pelaksanaan bulan Juni 2005, yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :

1. RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2005 direncanakan sebesar Rp. 1.059.639.014.159,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan Bulan Juni 2005 sebesar Rp. 521.738.051.030,00 atau mencapai sebesar 49,24%, dengan perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-1

Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1.	Pendapatan Asli	207.947.690.000,00	108.248.287.365,00	52,06

	Daerah (PAD)			
2.	Dana Perimbangan	819.111.324.159,00	410.122.864.419,00	50,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	32.580.000.000,00	3.366.899.246,00	10,33
J U M L A H		1.059.639.014.159,00	521.738.051.030,00	49,24

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2005 direncanakan sebesar Rp. 207.947.690.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 108.248.287.365,00 atau penerimaannya mencapai 52,06%.

Adapun perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-2
Perincian Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2005

NO	JENIS	Tahun 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Pajak Daerah	132.250.000.000,00	66.893.236.693,00	50,58
2	Retribusi Daerah	63.843.690.000,00	32.751.936.665,00	51,30
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	--	2.552.953.482,00	
4	Lain-lain PAD yang Sah	11.854.000.000,00	6.050.160.525,00	51,04
	JUMLAH	207.947.690.000,00	108.248.287.365,00	52,05

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

(2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus; (4) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi;

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2005 direncanakan sebesar Rp. 819.111.324.159,00 dan sampai Bulan Juni 2005 dapat direalisasikan sebesar Rp. 410.122.864.419,00 atau mencapai 50,07 %.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-3
Perincian Dana Perimbangan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2005

NO	JENIS	Tahun 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	194.967.142.889,00	58.142.289.419,00	29,98
2	Dana Alokasi Umum	458.070.000.000,00	267.208.662.000,00	58,33
3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	166.144.181.270,00	84.771.913.000,00	51,02
J U M L A H		819.181.324.159,00	410.122.864.419,00	50,07

Catatan : *Realisasi sampai Bulan Juni 2005

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari bantuan dana kontingensi/penyeimbang dari pemerintah Pusat berupa Bantuan dana penyeimbang.

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2005 direncanakan sebesar Rp. 32.580.000.000,00 dan sampai Bulan Juni 2005 realisasinya sebesar Rp. 3.366.899.246,00

2. RENCANA DAN REALISASI BELANJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode satu tahun anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum. Selanjutnya, Belanja Daerah terdiri dari : (1) Belanja Aparatur, (2) Belanja

Publik, (3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta (4) Belanja Tidak Tersangka.

Berdasarkan pengertian dan jenis belanja tersebut, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2005 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.127.019.510.088,00 dan sampai Bulan Juni baru dapat direalisasikan Rp. 413.341.129.897,00 atau mencapai 36,66% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-4
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2005

No	JENIS	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Belanja Aparatur	436.386.593.089,00	145.077.723.656,00	33,25
2	Belanja Publik	606.803.141.499,00	210.693.951.928,00	34,72
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	82.079.775.500,00	57.185.159.313,00	69,76
5	Belanja Tidak Tersangka	1.750.000.000,00	384.295.000,00	21,96
J U M L A H		1.127.019.510.088,00	413.341.129.897,00	36,66

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2005, dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Aparatur

Belanja Aparatur pada tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp. 436.386.593.089,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 145.077.723.656,00 atau 33,25%.

Adapun perincian Belanja Aparatur pada Tahun Anggaran 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-5
Perincian Belanja Aparatur Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2005

No	JENIS	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Belanja Administrasi Umum	355.651.383.948,00	128.555.003.246,00	36,15
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	53.387.273.354,00	12.865.676.412,00	24,10
3	Belanja Modal	27.347.935.787,00	3.657.043.998,00	13,37
J U M L A H		436.386.593.089,00	145.077.723.656,00	33,25

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

(2) Belanja Publik

Belanja Publik pada tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp. 606.770.382.649,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.210.693.951.928,00 atau 34,72%.

Adapun perincian Belanja Publik pada Tahun Anggaran 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-6
Perincian Belanja Publik Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2005

No	JENIS	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Belanja Administrasi Umum	358.825.926.161,00	156.269.972.706,00	43,55
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	149.133.526.097,00	22.557.179.318,00	15,13
3	Belanja Modal	98.810.930.391,00	31.866.799.904,00	32,25
J U M L A H		606.770.382.649,00	210.693.951.928,00	34,72

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

(3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2005, dianggarkan sebesar Rp. 82.079.775.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.185.159.313,00 atau mencapai 69,67%.

Adapun perincian Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II-7
Perincian Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005

No	JENIS	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Belanja bantuan operasional pelayanan kesehatan	9.478.645.000,00	4.705.881.813,00	49,65
2	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan	1.667.000.000,00	606.750.000,-	36,40
3	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	63.513.746.500,00	49.587.615.000,00	78,07
4	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi profesi	7.420.384.000,00	2.284.911.600,00	30,79
J U M L A H		82.079.775.500,00	57.185.159.313,00	69,67

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

(4) Belanja Tidak Tersangka

Belanja Tidak Tersangka pada tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 384.295.000,00 atau 21,96%.

3. RENCANA DAN REALISASI PEMBIAYAAN

Bidang pembiayaan sesuai dengan bentuk dan susunan APBD Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 terbagi dalam 2 bidang pembiayaan yaitu bidang penerimaan daerah dan bidang pengeluaran daerah.

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2005, dianggarkan sebesar Rp. 67.380.495.929,00 dan sampai Bulan Juni 2005 perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-8
Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2005

No	JENIS	TAHUN ANGGARAN 2005		
		Anggaran	Realisasi*	%
1	Penerimaan Daerah	101.870.495.929,23	76.220.889,00	0,07
2	Pengeluaran Daerah	34.490.000.000,23	33.490.000.000,00	97,10
J U M L A H		67.380.495.929,00	33.566.220.889,00	49,82

Catatan: *Realisasi sampai Bulan Juni 2005.

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian dari komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Penerimaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp.101.870.495.929,23 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.220.889,00

Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari: penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

(2) Pengeluaran Daerah

Besarnya pengeluaran daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp. 34.490.000.000,23 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.490.000.000,00

Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari: penyertaan modal dan pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2006 DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2006

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pembiayaannya kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Untuk menentukan kegiatan pembangunan dengan pembiayaan bersumber pada kemampuan daerah dimana yang diatur sesuai Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sehingga perlu disusun suatu kebijakan Pendapatan, Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan diarahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai implementasi dari program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN

Kebijakan pendapatan daerah merupakan tuntunan pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai kebijakan menentukan pendapatan daerah yang didasarkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab Keuangan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja dengan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD dengan komponen sebagai berikut :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d. Dan lain-lain PAD yang sah
- 2. Dana perimbangan
- 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

STRATEGI UNTUK PRIORITAS KEBIJAKAN PENDAPATAN

Adapun kebijakan umum peningkatan pendapatan pada tahun anggaran 2006 diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta diupayakan efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

4.2. KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan Belanja Daerah merupakan kebijakan penggunaan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia dengan pengertian bahwa Belanja Daerah adalah Kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dirinci menurut kewenangan, organisasi dan jenis belanja.¹

Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Bandung tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) kota Bandung 2004-2008 sebagai berikut,

Misi Pertama, Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral agama yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar 15% dari total Belanja Non Adum

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota yang berilmu, trampil, sehat dan bermoral.

b. Sasaran

- 1). Meningkatnya derajat pendidikan kota, yang ditandai dengan meningkatnya indikator pendidikan pada tahun 2006.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 10,50 tahun menjadi 10,96 tahun
- Angka Melek Huruf (AMH) dari 99,12% menjadi 99,30%
- Angka Partisipasi Kasar (APK) disetiap jenjang pendidikan
 - Tingkat setara SD 138,41% menjadi 138,42%
 - Tingkat setara SMP 106,85% menjadi 108,80%
 - Tingkat setara SMA 82,33% menjadi 84%
- Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan
 - Tingkat setara SD menjadi 100%
 - Tingkat setara SMP 78,12% menjadi 80%
 - Tingkat setara SMA 58,71% menjadi 60%
- Angka Putus Sekolah (APS) disetiap jenjang pendidikan
 - Tingkat setara SD 0,10% menjadi 0,08%
 - Tingkat setara SMP 0,58% menjadi 0,50%
 - Tingkat setara SMA 0,52% menjadi 0,50%

2). Meningkatkan derajat kesehatan kota ditandai dengan indikator kesehatan pada tahun 2006 adalah,

- Melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk kota Bandung tahun 2004 sebesar 72.56 tahun menjadi 73.56 tahun pada tahun 2006.
- Melalui penurunan Angka kematian Ibu tahun 2004 sebesar 11 jiwa/tahun dari jumlah ibu yang melahirkan dan tercatat oleh Dinas Kesehatan menjadi kurang dari 11 jiwa pada tahun 2006.

3). Meningkatnya penerapan moral dalam segenap aktivitas kegiatan individu keluarga, masyarakat dan aparatur pemerintah berdasarkan parameter upaya/pasilitasi pemerintah kota dalam pelaksanaan kegiatan yang diharapkan berdampak pada sasaran ketiga ini.

Misi Kedua, Mengembangkan perekonomian kota yang adil yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dan

meningkatkan pendapatan masyarakat yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar 20% dari total Belanja Non Adum

a. Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi kota yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

b. Sasaran

1) Meningkatnya aktivitas usaha kecil, menengah dan besar dibidang perindustrian dan perdagangan, dengan target tercapainya IDB pada tahun 2006 sebesar 71,1 (kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota se Jawa Barat dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Jawa barat 2010) melalui:

- Meningkatnya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki akses terhadap permodalan dan pemasaran sebesar 40% dari 1.000 UKM yang dibina;
- Meningkatnya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 20% dari 1.000 UKM yang dibina;
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebesar 40% dari 85.000 penganggur;
- Meningkatnya volume penjualan dalam negeri dan nilai ekspor sebesar 10%;
- Meningkatnya klasifikasi jumlah usaha mikro ke usaha kecil sebesar 5% dari 1000 UKM yang dibina.

2) Meningkatnya aktivitas usaha perkoperasian, dengan target

- Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri pada tahun 2006 sebesar 20% dari 1600 koperasi yang aktif;

3) Meningkatnya penanaman modal/investasi, dengan target :

- Meningkatnya nilai investasi dengan target dalam kondisi normal mencapai sebesar Rp. 6.224.922.000.000 dan dalam kondisi optimis mencapai sebesar Rp. 6.347.640.000.000,-;

- 4) Meningkatnya aktivitas usaha kepariwisataan, dengan target :
 - Meningkatnya kunjungan wisatawan sebesar 2.019.600 orang (Wisman 94.600 dan Wisnus 1.925.000);
 - Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bandung menjadi Rp. 85.58 Milyar;
 - Menambahnya keragaman daya tarik wisata di Kawasan Ujungberung;
 - Bertambahnya 1 (satu) unit "Tourism Center" .
- 5) Meningkatnya aktivitas penyediaan komoditas hasil – hasil pertanian yang berkualitas, dengan target :
 - Meningkatnya kualitas produk pertanian yang memenuhi standar kesehatan dan kehalalan sebesar 75% dari komoditi yang diperiksa;
 - Terinformasikannya tentang penyakit hewan yang berakibat terhadap manusia (zoonosis) di 26 kecamatan;
 - Meningkatnya pendapatan petani yang dibina sebesar 5%.

Misi Ketiga, Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, Keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar 15% dari total Belanja Non Adum.

a. Tujuan

Meningkatkan Pembentukan sikap dan prilaku masyarakat yang menunjang pembangunan kota.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja, melalui peningkatan jaminan dan perlindungan tenagakerja sebanyak 10 % dari jaminan dan perlindungan tenagakerja tahun 2005
- 2) Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat,
- 3) Meningkatnya keluarga sejahtera, melalui peningkatan Keluarga Sejahtera 0.35 % dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 4) Meningkatnya aktivitas kepemudaan yang menunjang kreativitas dan prestasi olah raga, melalui berkembangnya kegiatan-kegiatan kepemudaan dan meningkatnya prestasi olah raga sebesar 10 %
- 5) Terlestarikannya seni dan budaya daerah, melalui terpelihara dan terlestarikannya seni budaya daerah yang menunjang pengembangan keparawisataan dengan apresiasi seni budaya sunda sebesar 10 % dari pegelaran seni budaya pada tahun 2005.
- 6) Menurunnya pengangguran angkatan kerja, melalui meningkatnya jumlah penempatan jumlah Tenaga Kerja Lokal (AKL) sebanyak 15 % (2.243 orang) pada tahun 2006 dari penempatan AKL 1.950 orang pada tahun 2004.
- 7) Meningkatnya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 8) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - Melalui kedudukan perempuan di eksekutif untuk eselonering tahun 2005 sebanyak 18%, dan target untuk tahun 2006 meningkatkan jumlah pejabat di Kota Bandung sesuai dengan kualifikasi.

Misi Keempat, Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar 30% dari total Belanja Non Adum.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota yang sesuai dengan potensi dan berwawasan lingkungan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota, dengan target :
 - Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang/pendukung pengembangan kawasan Gedebage, target kumulatif menjadi 5 %.

- Meningkatnya perbaikan jalan 8 %, perbaikan saluran 14 % dan perbaikan trotoar 5 %.
 - Tersusunnya disain-disain overpass dan jalan-jalan baru, target kumulatif 30 %.
 - Meningkatnya kebersihan sungai dan saluran 10.000 meter¹.
 - Berkurangnya lokasi banjir 10 lokasi.
 - Meningkatnya ketertiban sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target kumulatif : sarana 10 % dan ornamen kota 25 %.
 - Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB, target kumulatif 4 %.
 - Terbentuknya basis data asset-asset Pemerintah Kota 50.000 m².
 - Terwujudnya asset pemerintah kota yang memberikan kontribusi terhadap PAD 200.000 m².
- 2) Meningkatnya kualitas pelayan sistem transportasi kota, dengan target:
- Meningkatnya arahan kebijakan dan program pengembangan transportasi kota 1 kegiatan.
 - Meningkatnya intensitas pemeliharaan alat-alat lalu-lintas (rambu) 30 %
 - Meningkatnya ketertiban jalur transportasi, penataan rute angkutan umum dan pengembangan sistem angkutan massal (SAUM), target kumulatif 50 %.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum (aman, nyaman dan terjangkau) 10 %.
 - Tersedianya terminal dan sub terminal penumpang umum, gedung dan fasilitas umum yang representatif 20 %.
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota, dengan target :
- Meningkatnya upaya penataan taman kota 20 %.
 - Terwujudnya upaya peningkatan proporsi ruang terbuka hijau, target kumulatif 4 %.

- Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat pada masalah lingkungan 2 kegiatan.
 - Peningkatan cakupan pelayanan air bersih 5 %.
 - Meningkatnya upaya penanganan permasalahan pengangkutan dan pembuangan sampah skala kota 25 %.
 - Terkendalinya pencemaran di bawah tanah, permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah 50 industri.
 - Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup 20 kasus.
 - Meningkatnya gerakan penghijauan kota 10 %.
 - Meningkatnya pembangunan sumur resapan 10 %.
- 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, dengan target :
- Meningkatnya upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh perkotaan 2 lokasi.
 - Berkembangnya sistem perumahan vertikal dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan 3 lokasi.
- 5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang kota, dengan target:
- Meningkatnya jumlah dan kualitas dokumen perencanaan tata ruang 3 kegiatan.
 - Terkendalinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota 5 %.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang secara lebih aktif 5 %.
 - Terbentuknya basis data asset-asset pemerintah kota, target kumulatif 40 %.

Misi Kelima, Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar 10% dari total Belanja Non Adum.

a. Tujuan

Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya pemberantasan KKN, dengan target :
 - Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang ditandai dengan menurunnya jumlah temuan dari 434 temuan pada tahun 2004 menjadi 419 temuan (sebanyak 15 temuan) pada tahun 2006.
 - Menurunnya pelanggar Peraturan Daerah sebesar 10 %.
 - Tersusunnya produk hukum daerah yaitu berupa 10 buah PERDA, 10 Lembaran Kota dan 10 Lembaran Daerah.
- 2) Meningkatnya pendidikan dan partisipasi politik masyarakat, dengan target :
 - Terbinanya organisasi masyarakat dan politik melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat sebanyak 100 orang;
 - Terwujudnya pemahaman dan pembauran bangsa serta kerukunan antar masyarakat sebanyak 100 orang.
- 3) Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, dengan target :
 - Terselenggaranya Diklat Prajabatan sebanyak 320 orang, diklat kepemimpinan sebanyak 80 orang, diklat teknis manajemen sebanyak 160 orang, diklat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) sebanyak 40 orang dan diklat teknis lainnya.

- 4) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan target:
 - Terlaksananya operasi penertiban PKL pada kawasan 7 titik dan kawasan lainnya;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan, melalui kursus kader pelaksanaan perlindungan masyarakat (TOT) LINMAS sebanyak 50 orang.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan;

Misi Keenam, mengembangkan sistem keuangan kota, yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat sebesar 10% dari total Belanja Non Adum.

a. Tujuan

Mengembangkan sistem keuangan kota, yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pendapatan daerah, dengan target :
 - Meningkatnya cakupan layanan BUMD sebesar 60%;
- 2) Meningkatnya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya efektivitas, afisiensi, transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah.

STRATEGI UNTUK PRIORITAS KEBIJAKAN BELANJA

Prioritas Kebijakan Belanja tidak akan terlepas dari Agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu melaksanakan 17 (tujuh belas) agenda prioritas pembangunan dengan memperhatikan kesesuaian dengan 6 (enam) misi pembangunan yang telah diuraikan, maka kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2006, yang dirinci dalam strategi dan program pembangunan, adalah sebagai berikut,

1. ***Membangun sinergitas pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah (KUKM) berbasis kewilayahan dalam berbagai sektor***, melalui strategi dan program,

Strategi :

- Meningkatkan koordinasi lintas sector melalui peningkatan peran kewilayahan;
- Meningkatkan pengembangan KUKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam berbagai sektor melalui fasilitasi oleh unit kerja terkait dalam berbagai aspek (manajemen, permodalan, perijinan, pemasaran, kualitas produk)

Program :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- Program Pembinaan Usaha Kecil;

2. ***Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi***, melalui Strategi dan Program,

Strategi :

- Meninjau kembali dan menyempurnakan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan investasi dan pelayanan perijinan;
- Memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam investasi;
- Meningkatkan koordinasi dan promosi investasi;
- Memberikan insentif dan disinsentif melalui penyebaran infrastruktur pelayanan ke wilayah Bandung Timur;
- Memberikan insentif dan disinsentif sesuai arahan tata ruang
- Memberikan kemudahan (insentif) dalam pembangunan infrastruktur di Wilayah Bandung Timur.

Program :

- Program Peningkatan Investasi Kota;

3. ***Meningkatkan Kualitas Pariwisata Kota Kandung***, melalui Strategi dan Program,

Strategi :

- Mempertahankan kondisi kota yang sudah tertata, termasuk taman dan elemen estetika kota, terutama di 7 titik pasca Konfrensi Asia Afrika;
- Meningkatkan kualitas perencanaan;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor;
- Meningkatkan promosi pariwisata ;
- Meningkatkan SDM pariwisata;
- Menata obyek-obyek wisata;
- Memfungsikan dan meningkatkan peran Badan Pembinaan & Promosi Kepariwisataan

Program :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Program Pengembangan Produk Kepariwisataan.

4. ***Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pengawasan mutu produk pertanian***, melalui strategi dan program,

Strategi :

- Meningkatkan frekuensi pemeriksaan kualitas produk pertanian secara organoleptik dan laboratorium;
- Meningkatkan prasarana dan sarana laboratorium uji mutu dan RPH/RPA;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (sdm) pemotong ternak bersertifikasi halal;
- Meningkatkan kinerja check point di pasar induk;
- Meningkatkan sosialisasi tentang penyakit hewan yang berdampak terhadap manusia (zoonosis) seperti anthrax, flu burung, penyakit mulut dan kuku, rabies, madcow;

- Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan usaha pertanian;
- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
- Peningkatan inovasi agribisnis;
- Pengembangan sistem informasi, promosi dan kemitraan dalam usaha agribisnis.

Program :

- Program Pengembangan Agrobisnis;
- Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

5. ***Pemberdayaan dan pengembangan BUMD***, melalui strategi dan program :

Strategi :

- Meningkatkan profesionalisme BUMD (manajemen, sdm, teknis operasional);
- Pengkajian pembentukan BUMD
- Pembentukan BUMD

Program :

- Peningkatan kinerja BUMD

6. ***Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin***, melalui strategi dan Program,

Strategi :

- Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada \pm 20.000 siswa dari keluarga tidak mampu disetiap jenjang pendidikan terutama jenjang SMP/setara SMP
- Meningkatkan efektivitas & efisiensi penggunaan bangunan ruang/gedung, serta prasarana pendidikan lainnya.
- Meningkatkan volume pemeliharaan bangunan ruang kelas/gedung, serta prasarana pendidikan lainnya.
- Memberikan bantuan rehabilitasi sekolah melalui dana imbal swadaya.

- Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui perintisan kebijakan rayonisasi dalam penerimaan murid baru.
- Mengembangkan pengelolaan & transparancy. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- Meningkatkan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) melalui pemberian bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Meningkatkan kemitraan dengan Stake holders pendidikan & Dunia Usaha/ Dunia Industri.
- Mengembangkan SMP Terbuka dalam upaya memantapkan Wajardiknas 9 Tahun.
- Memberikan fasilitas pembinaan keagamaan di sekolah.

Program :

- Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah;
- Program Pendidikan Menengah;
- Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;
- Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama;

7. *Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin* dengan strategi dan Program,

Strategi :

- Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui asuransi kesehatan
- Revitalisasi dan optimalisasi Posyandu melalui peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan kader Posyandu serta kelengkapan sarana dan prasarana Posyandu
- Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin
- Pengamatan kasus anak balita gizi buruk dan pencegahan busung lapar/rawan gizi

- Pemantauan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui peningkatan fungsi Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) serta lembaga-lembaga kemasyarakatan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Peningkatan pelayanan kesehatan serta Penambahan obat-obatan

Program :

- Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

8. ***Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi***, dengan strategi dan Program,

Strategi :

- Meningkatkan peran balai latihan kerja;
- Memfasilitasi kerjasama antar lembaga pendidikan dengan pasar kerja
- Meningkatkan pelayanan serta pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program :

- Program Pembinaan, pengembangan produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan
- Program Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

9. ***Pengembangan Wilayah Bandung Timur***, dengan strategi dan Program,

Strategi :

- Penyusunan RDTRK Ujungberung;
- Mengikutsertakan swasta dalam penyediaan infrastruktur;
- Pencadangan taman dan ruang terbuka hijau di Wilayah Bandung Timur;
- Sosialisasi Master Plan Gedebage;
- Penyiapan, pencadangan dan pengamanan lahan;
- Penjajagan kerjasama dengan pihak swasta;

- Studi air baku untuk penyediaan air bersih di Wilayah Bandung Timur.

Program :

- Program Pengembangan Kawasan Gedebage;

10. **Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur kota**, dengan strategi dan Program,

Strategi :

- Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dasar perkotaan di lingkungan permukiman kumuh;
- Meningkatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur kota;
- Menyiapkan dan pencadangan lahan untuk pengembangan infrastruktur kota;
- Meningkatkan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan;
- Perbaiki dan peningkatan sarana dan prasarana cakupan air bersih, air limbah, drainase, pengelolaan sampah kota;

Program :

- Program Penataan prasarana dan sarana kota;
- Program penataan lingkungan permukiman;
- Program tata ruang dan penatagunaan tanah;

11. **Meningkatkan pelayanan transportasi kota**, melalui strategi dan program,

Strategi :

- Mempersiapkan rencana induk sistem transportasi kota;
- Mengembangkan mekanisme pengendalian transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi kota;
- Mengembangkan sistem angkutan umum massal (SAUM);
- Mengembangkan terminal tipe B dan C di batas kota.

Program :

- Program pengembangan, penataan transportasi kota;

12. ***Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup*** dengan strategi dan program,

Strategi :

- Memperluas wilayah penataan termasuk penyediaan ruang terbuka hijau sesuai aspirasi masyarakat
- Kampanye kepedulian pada masalah lingkungan
- pendampingan dalam mengatasi dampak lingkungan dan perilaku sehat
- penyediaan air baku melalui Peningkatan gerakan penghijauan kota dan pembuatan sumur resapan

Program :

- Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan;

13. ***Meningkatkan kualitas perencanaan kota***, dengan strategi dan program,

Strategi :

- mengembangkan perencanaan partisipatif (*stakeholder*) dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur kota);
- meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap dokumen perencanaan;
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- meningkatkan kualitas basis data perencanaan melalui revisi dokumen perencanaan dan updating data;
- penegakan hukum sebagai sanksi terhadap pelanggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Program :

- Program Peningkatan perencanaan Kota;
- Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;
- Program peningkatan hukum;
- Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

14. **Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur**, dengan strategi dan program,

Strategi :

- Pemekaran Wilayah;
- Penguatan Kewenangan dan Tupoksi Kecamatan;
- Pelimpahan kewenangan kpd kelurahan dan penguatan tupoksi kelurahan;
- Penataan kewenangan dan tupoksi lembaga tehnis dan dinas daerah;
- Meningkatkan sistem, sarana dan prasarana pemerintahan;
- Meningkatkan kualitas pembinaan aparatur;
- Penataan administrasi kepegawaian;
- pemberian *reward* dan *punishmen*;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas auditor;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan;
- Pengisian jabatan struktural di kecamatan dan kelurahan.
- penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Program :

- Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota;
- Program Pelayanan Prima;
- Program Pelayanan kependudukan;
- Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;
- Program Peningkatan prasarana dan sarana aparatur pemerintahan;
- Program peningkatan kualitas pengawasan.

15. ***Pengembangan Kemitraan dalam rangka mendukung pembiayaan dari berbagai aspek***, dengan strategi dan program,

Strategi :

- Peningkatan Peran serta dunia usaha melalui fasilitasi Dewan Pengembangan Ekonomi;
- Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah melalui peningkatan kerjasama dengan swasta sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan (saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan)

Program :

- Program Pengembangan kemitraan;
- Program Peningkatan sistem pembiayaan pembangunan;
- Program Pengembangan dan pengamanan aset pemerintah kota;
- Program pengembangan kerjasama antar daerah;

16. ***Meningkatkan seni budaya daerah & prestasi olah raga***, dengan strategi dan program :

Strategi :

- Terpelihara dan terlestarikannya seni budaya daerah yang menunjang pariwisata melalui apresiasi seni budaya sunda;
- Terwujudnya dan tergalinya budaya daerah yang dapat mawadahi dan menangkal dampak negatif arus globalisasi melalui produksi materi seni publikasi;
- Meningkatnya sarana & prasarana seni dan budaya yang representatif melalui rehabilitasi padepokan seni;
- Meningkatnya partisipatif masyarakat akan pelestarian budaya daerah, apresiator;
- Meningkatnya apresiasi budaya daerah melalui inventarisasi data bangunan bersejarah, pentas seni budaya pada sentra-sentra budaya pariwisata;
- Tercapainya prestasi olah raga melalui event-event pertandingan;

- Berkembangnya kegiatan kepemudaan baik melalui organisasi maupun olah raga.

Program :

- Program pengembangan seni budaya daerah;
- Program pembinaan pemuda dan olah raga.

17. ***Pengembangan masalah sosial & pemberdayaan perempuan***, dengan strategi dan program :

Strategi :

- Menurunnya/berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan melalui pengarusutamaan gender pada seluruh sektor pembangunan di Kota Bandung;
- Meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas keluarga, masyarakat, pembangunan & pemerintahan melalui advokasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
- Menurunnya jumlah penduduk miskin melalui pembinaan kesejahteraan sosial dengan bimbingan, pelatihan wanita rawan sosial ekonomi.

Program :

- Program pelayanan rehabilitasi dan partisipasi sosial;
- Program pemberdayaan perempuan.

Secara terinci keterkaitan antara 17 agenda dengan program Renstra dan Indikator Makro Pembangunan IPM sebagai berikut :

No.	Agenda	Program Renstra	Keterkaitan dengan Indikator Makro Pembangunan (IPM)
1	2	3	4
1.	Membangun sinergitas pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah (KUKM) berbasis kewilayahan dalam berbagai sektor	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;	IDB

1	2	3	4
		Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;	IDB
		Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;	IDB
		Program Pembinaan Usaha Kecil;	IDB
2.	Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi	Program Peningkatan Investasi Kota	
3.	Meningkatkan Kualitas Pariwisata Kota Kandung	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	
		Program Pengembangan Produk Kepariwisata.	
4.	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pengawasan mutu produk pertanian	Program Pengembangan Agrobisnis;	
		Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	
5.	Pemberdayaan dan pengembangan BUMD	Peningkatan kinerja BUMD	
6.	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin	Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah;	IP
		Program Pendidikan Menengah;	IP
		Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;	IP
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama;	IP
7.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;	IPH
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;	IPH

1	2	3	4
8.	Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi	Program Pembinaan, pengembangan produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan	IDB
		Program Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi	IDB
9.	Pengembangan Wilayah Bandung Timur	Program Pengembangan Kawasan Gedebage	IPM
10.	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur kota	Program Penataan prasarana dan sarana kota;	IPM
		Program penataan lingkungan permukiman	IPM
		Program tata ruang dan penatagunaan tanah	IPM
11.	Meningkatkan pelayanan transportasi kota	Program pengembangan, penataan transportasi kota	IPM
12.	Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan	IPM
13.	Meningkatkan kualitas perencanaan kota	Program Peningkatan perencanaan Kota;	IPM
		Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;	IPM
		Program peningkatan hukum;	IPM
		Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IPM
14.	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur	Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota;	
		Program Pelayanan Prima;	
		Program Pelayanan kependudukan;	

1	2	3	4
		Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;	
		Program Peningkatan prasarana dan sarana aparatur pemerintahan.	
15.	Pengembangan Kemitraan dalam rangka mendukung pembiayaan dari berbagai aspek	Program Pengembangan kemitraan;	IPM
		Program Peningkatan sistem pembiayaan pembangunan;	IPM
		Program Pengembangan dan pengamanan aset pemerintah kota;	IPM
		Program peningkatan kinerja BUMD;	IPM
		Program pengembangan kerjasama antar daerah.	IPM
16.	Meningkatkan seni budaya daerah & prestasi olah raga	Program pengembangan seni budaya daerah;	
		Program pembinaan pemuda dan olah raga.	
17.	Pengembangan masalah sosial & pemberdayaan perempuan	Program pelayanan rehabilitasi dan partisipasi sosial;	
		Program pemberdayaan perempuan.	

Keterangan :

IPM : Indek Pembangunan Manusia

IP : Indek Pendidikan

IPH : Indek Peluang Hidup

IDB : Indek Daya Beli

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

- Sebagaimana Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bahwa komponen pembiayaan dalam struktur APBD merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran
- Berdasarkan kondisi umum pembiayaan yang terjadi saat ini pada pemerintahan Kota Bandung bahwa permasalahan yang muncul adalah masih adanya beban-beban kewajiban hutang yang sudah jatuh tempo dari hutang sifatnya jangka panjang ke jangka pendek. Dengan demikian maka kebijakan pembiayaan pada tahun anggaran 2006 akan dilakukan melalui upaya-upaya untuk melunasi hutang-hutang Pemerintah Kota yang sudah jatuh tempo.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU) merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dasar dalam perencanaan operasional anggaran, di dalamnya memuat arah kebijakan sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Kota Bandung dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2006.

AKU mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (APBD). Komponen dan kinerja pelayanan yang disusun tersebut terutama didasarkan pada aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah yang ada serta evaluasi dari kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Dalam pelaksanaan, adanya penetapan strategi sangat diperlukan sebagai suatu cara untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya sangat disesuaikan dengan kemampuan daerah, terutama dalam sumber pendanaannya, untuk itu perlu disusun program kerja prioritas.

Demikian Nota Kesepakatan ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk Pihak KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

HUSNI MUTTAQIN

DADA ROSADA